**DINAMIKA HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA-LEMBAGA HUKUM NASIONAL DAN MAHKAMAH KONSTITUSI: PERSPEKTIF KONFLIK DAN KOLABORASI**

El Renova Ed. Siregar¹; Adya Paramita Prabandari²

¹Master of Law, Diponegoro University, Indonesia ¹Researchers at the National Research and Innovation Agency (BRIN), Indonesia

²International Law Lecturer, Diponegoro University, Indonesia

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji dinamika interaksi antara Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi) dengan lembaga-lembaga hukum nasional di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengeksplorasi potensi konflik dan kolaborasi antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga hukum lainnya. Bagan peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran unik sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, memunculkan dinamika yang kompleks dengan lembaga hukum lainnya. Potensi konflik muncul terutama terkait dengan *dual chamber* dalam pembentukan pengujian peraturan perundang-undangan terutamanya wewenang Mahkamah Konstitusi dan MA serta sistem pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi yang membuka peluang terjadinya politik hukum. Namun demikian, terdapat peluang kolaborasi melalui revisi Undang - Undang Mahkamah Konstitusi dan dialog intensif antarlembaga untuk mencapai interpretasi hukum yang konsisten dan efektif. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem peradilan, pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi, dan kerangka hukum diusulkan sebagai langkah-langkah penting dalam meningkatkan integritas dan responsivitas lembaga peradilan di Indonesia.

Kata Kunci : dinamika hukum; lembaga hukum; mahkamah konstitusi

***Abstract***

*This research examines the dynamics of interaction between the Constitutional Court (*Mahkamah Konstitusi*) and national legal institutions in Indonesia. Using a normative legal research method, this study explores the potential conflicts and collaborations between Mahkamah Konstitusi and other legal institutions. The judicial system chart in Indonesia indicates that Mahkamah Konstitusi has a unique role as both the first and final level of the judiciary, creating complex dynamics with other legal institutions. Potential conflicts arise, especially regarding the dual chambers in the formation of legislation, the testing authority of Mahkamah Konstitusi and the Supreme Court (*Mahkamah Agung*), and the system of selecting Constitutional Court judges, which opens opportunities for legal-political influences. However, there are opportunities for collaboration through the revision of the Mahkamah Konstitusi Law and intensive inter-institutional dialogue to achieve consistent and effective legal interpretations. A comprehensive evaluation of the judicial system, the selection of Constitutional Court judges, and the legal framework is proposed as crucial steps to enhance the integrity and responsiveness of the judiciary in Indonesia.*

*Keywords: legal dynamics; legal institutions; constitutional court*

**Pendahuluan**

1. **Latar Belakang**

Sistem hukum nasional adalah sebuah kerangka kerja hukum yang memberikan atau menyediakan aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat yang hidup dalam suatu negara. Dalam sistem hukum nasional terdapat lembaga-lembaga yang terlibat untuk mencapai tujuan memastikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh masyarakat serta membangun kebijakan yang berkeadilan dan menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Lembaga-lembaga yang terlibat antara lain adalah lembaga-lembaga hukum seperti legislatif, eksekutif dan lembaga yudikatif.

 Salah satu lembaga yang memiliki peran dalam penegakan sistem hukum nasional adalah mahkamah konstitusi. Berdasarkan penjabaran oleh [[1]](#footnote-1) Mahkamah konstitusi memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang dan tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melakukan penilaian apakah undang-undang tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang ada di Indonesia. Selain itu, seperti yang dikutip pada penjelasan [[2]](#footnote-2) Mahkamah Konstitusi memiliki peran di mana jika terjadi permasalahan dengan perundang-undangan yang sudah ditetapkan maka Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk segera melakukan pengujian materi terhadap isi undang-undang tersebut. Sebagai lembaga yang independen, Mahkamah Konstitusi juga akan terlibat aktif pada proses amandemen untuk menjaga dan memastikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi sesuai atau dapat mencerminkan prinsip konstitusi yang berlaku.

 Dalam hubungan antar lembaga nasional dan Mahkamah Konstitusi tidak jarang muncul dinamika yang kompleks [[3]](#footnote-3). Potensi dari konflik pada kolaborasi dari Mahkamah Konstitusi akan tetap terjadi dan dapat menjadi ujian yang signifikan terutama pada konteksi kebijakan perundang-undangan yang memiliki dampak atau melibatkan hak-hak individu. Penerimaan dari putusan Mahkamah Kontitusi oleh lembaga hukum yang lain akan menjadi elemen penting dalam keberlangsungan dinamika Mahkamah Konstitusi dengan lembaga hukum negara [[4]](#footnote-4). Selain itu, [[5]](#footnote-5) menjabarkan bahwa konteks dan iklim politik serta sosial juga dapat memberikan pengaruh terhadap interaksi antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga hukum nasional utnuk menciptakan sistem yang responsif serta efektif dalam menjaga hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat.

 Maka dari itu, melihat bagaimana interaksi antara Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga hukum nasional mampu membuahkan konflik maupun kolaborasi, diperlukan suatu penelitian yang mengkaji bagaimana dinamika hubungan yang antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga-lembaga hukum nasional.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka beberapa masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana peran lembaga-lembaga hukum dan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya di penyelenggaraan pemerintahan?
2. Bagaimana konflik Lembaga-lembaga hukum dan Mahkamah Konstitusi sebagai peluang kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan?
3. **Metodologi Penelitian**

 Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.Penelitian hukum normatif berdasarkan penjelasan merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk melakukan analisa terhadap pertaruan hukum, perundang-undangan dan juga putusan yang diberikan atau ditetapkan oleh peradilan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum lainnya dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif.

**Pembahasan**

 Mengutip penjelasan [[6]](#footnote-6) yang kemudian diubah berdasarkan [[7]](#footnote-7) maka bagan peradilan di Indonesia dapat disimpulkan seperti pada Gambar 1 di bawah ini., dimana berdasarkan bagan tersebut Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak berkaitan atau di luar strata hukum di Indonesia namun masih memiliki keterikatan dengan lembaga-lembaga hukum lainnya. Bagan ini dijelaskan sesuai fungsi kepentingan kepentingan pada umumnya dan tidak dijelaskan secara menyeluruh. Dapat kita lihat bahwa posisi Mahkamah Konstitusi berada setara dengan Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Konstitusi memiliki sifat yang berbeda dari MA karena berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi pasal 10, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan Tingkat pertama dan terakhir, hal ini memberikan kita gambaran uniknya peran Mahkamah Konstitusi yang bisa berpengaruh pada dua aspek sekaligus, hal ini menimbulkan dinamika yang unik dengan lembaga hukum lainnya [[8]](#footnote-8). Sebelum melakukan analisa lebih lanjut, peneliti menyediakan rangkuman mengenai posisi dan hubungan Mahkamah Konstitusi sesuai degan diagram di bawah ini:



Gambar 1. Bagan Peradilan di Indonesia

Berdasarkan bagan tersebut maka dapat dijabarkan lembaga dan tugas-tugasnya seperti yang dikutip pada [[9]](#footnote-9) adalah sebagai berikut:

1. Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari berbagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi masing-masing.
2. Mahkamah Agung berperan sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Tugas utamanya melibatkan pengadilan kasasi, dimana Mahkamah Agung memeriksa banding terakhir atas putusan pengadilan di seluruh Indonesia.
3. Mahkamah Agung juga memiliki peran sebagai pengawas terhadap sistem peradilan secara menyeluruh, termasuk pengawasan terhadap etika dan disiplin hakim.
4. Struktur internal Mahkamah Agung mencakup Dewan Peradilan Agung yang bertugas mengatur dan mengawasi jalannya peradilan, serta Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk koordinasi kegiatan peradilan nasional.

Selain Mahkamah Agung, terdapat juga Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi) yang merupakan pengadilan konstitusi di Indonesia. Tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji keberlakuan undang-undang terhadap norma-norma konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus perkara sengketa hasil pemilihan umum dan berperan sebagai lembaga peradilan dalam sistem hukum, memastikan keselarasan peraturan hukum dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem peradilan umum di Indonesia terdiri dari peradilan sipil, militer, umum, dan khusus. Peradilan sipil, dalam hierarki yang melibatkan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung sebagai tingkat kasasi, memutus perkara-perkara hak-hak perdata. Sementara itu, peradilan militer memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum militer dan melibatkan tingkatan Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Militer Pertama.

Peradilan umum, yang juga terstruktur hierarkis dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung sebagai tingkat kasasi, memutus perkara-perkara hukum pidana dan perdata. Di sisi lain, peradilan khusus menangani perkara-perkara dengan karakteristik khusus, seperti pengadilan pajak, dengan kewenangan sesuai dengan bidang hukum yang menjadi fokusnya.

Peradilan agama, termasuk Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, memutus perkara-perkara hukum keluarga dan agama. Sementara itu, peradilan tata usaha negara, yang melibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung sebagai tingkat kasasi, memutus sengketa administrasi negara, seperti sengketa pelayanan publik dan tata ruang. Keseluruhan struktur peradilan ini mencerminkan kompleksitas dan keragaman dalam menangani berbagai jenis perkara di Indonesia.

***Potensi Konflik***

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsi-fungsi konstitusional di Indonesia. Tugas Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Salah satu tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian terhadap undang-undang yang berlaku. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan undang-undang tersebut tidak berlaku atau sebagian tidak berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi antara undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki tugas dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pemilihan umum, seperti pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa dan memutuskan apakah terdapat pelanggaran hukum dalam proses pemilihan tersebut. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum bersifat final dan mengikat.

Mahkamah Konstitusi juga memiliki tugas dalam memeriksa dan memutuskan sengketa yang berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undang. Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa apakah proses pembentukan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Jika Mahkamah Konstitusi menemukan adanya pelanggaran dalam proses pembentukan undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan undang-undang tersebut tidak berlaku.

Selain tugas-tugas tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memiliki tugas dalam melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memberikan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Penafsiran ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam penerapan Undang-Undang Dasar. Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi bahkan dapat memutuskan *impeachment* seorang presiden dan wakil presiden sekiranya DPR telah mengajukan mosi tidak percaya.

Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi) dapat dianggap sebagai lembaga superbody dalam sistem peradilan Indonesia, dengan kewenangan dan pengaruh yang signifikan. Keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang luas, mampu memengaruhi badan hukum lainnya dan mengubah akibat hukum dari keputusan di pengadilan lain, termasuk Mahkamah Agung.

Dalam konteks konflik, keputusan Mahkamah Konstitusi dapat menciptakan situasi di mana keputusan pengadilan lainnya menjadi terkualifikasi atau bahkan kehilangan akibat hukumnya. Ini dapat muncul karena Mahkamah Konstitusi memiliki yurisdiksi tertinggi dalam hal penafsiran konstitusi, dan keputusannya memiliki kekuatan mengikat secara nasional. Apabila ada perbedaan interpretasi atau pertentangan antara keputusan Mahkamah Konstitusi dan keputusan lembaga hukum lain, hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan hukum di tingkat nasional. Kondisi semacam ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum inilah yang menjadi permasalahan di Mahkamah Konstitusi[[10]](#footnote-10).

Keputusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi) dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap aturan otonomi daerah dan pembentukan Undang-Undang (UU) di Indonesia, membawa kompleksitas dan permasalahan dalam sistem hukum. Terdapat dua jalur yang berbeda dalam menyelesaikan perselisihan hukum, yaitu Mahkamah Agung (MA) untuk Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan UU, dan Mahkamah Konstitusi untuk UU yang bertentangan dengan konstitusi. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan bahkan kekacauan dalam pelaksanaan otonomi daerah[[11]](#footnote-11).

Otonomi daerah diatur dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2014, ditujukan untuk memberikan setiap daerah hak untuk menentukan hukum atau aturan yang sesuai dengan kepentingan lokal mereka. Dengan adanya dua jalur pengadilan yang berbeda, Mahkaman Agung dan Mahkamah Konstitusi, otonomi daerah terperangkap dalam dikotomi sistem hukum, menyebabkan kondisi membingungkan karena hukum dapat diterapkan sementara proses review masih berlangsung di dua ruang pengadilan yang berbeda.

Masalah utamanya adalah potensi konflik antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Konstitusi menjadi penafsir tunggal konstitusi sementara Mahkamah Agung memiliki kewenangan tersendiri. Dalam jangka panjang, ini dapat mengakibatkan daerah mengeluarkan Perda tanpa berkonsultasi dengan peradilan tinggi, meragukan integritas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kondisi sulit terjadi ketika hukum sudah diberlakukan dan diaplikasikan, namun pada saat yang bersamaan diuji di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan kesesuaian dengan Undang-Undang.

Sebagai perbandingan, di Prancis, setiap produk undang-undang diwajibkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pendekatan ini memungkinkan potensi konflik diselesaikan sebelum terjadi, untuk menghindari keraguan dan ketidakpastian dalam implementasi hukum. Perhatian tetap diberikan agar pengujian tidak hanya dilakukan berdasarkan kepentingan tertentu, sebagai pencegahan timbulnya potensi penyalahgunaan sistem. Dengan demikian, penting bagi Indonesia untuk mengevaluasi sistem peradilan dan menyusun mekanisme yang lebih efektif guna mengatasi kompleksitas dalam implementasi otonomi daerah dan harmonisasi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

***Peluang Politik Hukum di Mahkamah Konstitusi***

Peluang terjadinya pengaruh politik hukum di Mahkamah Konstitusi terhitung cukup besar. Hal ini karena sistem pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Pada dasarnya, Proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi) di Indonesia merupakan suatu tugas yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi[[12]](#footnote-12), mengingat pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Proses ini didasarkan pada prinsip-prinsip utama, seperti transparansi, demokrasi, dan integritas. Secara teoritis, menemukan model pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi yang ideal bukanlah hal yang mudah. Sebagai perbandingan, di Korea Selatan, pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh komite tujuh orang, yang menerima kandidat dari Presiden, lebih dari sepertiga anggota majelis nasional, dan serikat pengacara. Persyaratan pengalaman minimal lima belas tahun juga diterapkan hal ini merupakan pendekatan khusus agar kemampuan hakim Mahkamah Konstitusi benar benar teruji. Hal ini sama halnya dengan di Perancis, pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi melibatkan kekuasaan presiden, majelis senat, dan majelis nasional, dengan upaya memenuhi standar transparansi dan asas-asas dalam proses seleksi. Sementara itu, di Indonesia, Undang - Undang No. 24 tahun 2003 menjadi landasan utama pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi, terutama pada Pasal 18 dan Pasal 20. Pembagian perwakilan kekuatan politik, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif, memang dilakukan sesuai dengan prinsip trias politika namun memiliki banyak kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk masuknya politik hukum[[13]](#footnote-13).

Meskipun pembagian perwakilan terkesan seimbang secara nominal, hal ini tidak selalu mencerminkan prinsip kesetaraan yang sesungguhnya. Relasi politik antara eksekutif dan legislatif di Indonesia seringkali didasarkan pada kepentingan politik atau kesamaan kelompok, bukan pada fungsi saling mengawasi.

Sejarah menunjukkan bahwa koalisi mayoritas di parlemen cenderung menyetujui pilihan eksekutif, dan kekhawatiran muncul bahwa Mahkamah Konstitusi dapat terpengaruh oleh kekuatan politik dan kuasa. Posisi oposisi di Indonesia relatif lemah, dengan partai politik yang jarang memilih menjadi oposisi. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian dalam fungsi saling mengawasi, mempertanyakan independensi hakim Mahkamah Konstitusi dari pengaruh politik dan kuasa. Ketergantungan hakim Mahkamah Konstitusi pada kekuatan politis juga terlihat dalam pemilihan yang kurang transparan dan akuntabel, tanpa adanya komite khusus seperti di Korea Selatan.

Fenomena ini membuka celah bagi pengaruh kuasa yang kuat dan menghasilkan pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, seperti kasus Patrialis Akbar dan Guntur Hamzah. Kekhawatiran akan independensi Mahkamah Konstitusi dan potensi campur tangan politik serta korupsi dapat merugikan kepercayaan publik pada lembaga tersebut. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat menambah urgensi untuk menjaga integritas hakim Mahkamah Konstitusi sejak awal, karena proses pengadilan terhadap hakim yang bermasalah setelah putusan keluar mungkin tidak memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, perlunya penyesuaian dalam regulasi pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi untuk menghindari variasi proses antara lembaga eksekutif dan yudikatif. Kritikan terhadap seleksi hakim agung di tingkat Mahkamah Konstitusi juga mendorong kebutuhan akan transparansi dan dokumentasi yang jelas dalam proses pemilihan. Masyarakat ingin memahami secara menyeluruh bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi dipilih, mengingat kekuatan besar yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Dengan demikian, penyelarasan dan peningkatan transparansi dalam proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi menjadi esensial untuk menjaga integritas dan independensinya sebagai lembaga penegak konstitusi.

***Kolaborasi***

Meskipun Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi) dihadapkan pada sejumlah perubahan yang perlu dilakukan, tidak menutup kemungkinan adanya kolaborasi antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga hukum lainnya. Sejumlah langkah konkret dapat diambil untuk merumuskan kerangka kerja kerjasama yang lebih efektif. Pertama-tama, perlu dilakukan peninjauan dan revisi Undang - Undang Mahkamah Konstitusi dengan cermat. Posisi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi harus diselaraskan dengan lembaga peradilan lainnya, sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan dalam sistem peradilan nasional. Penting untuk menanggulangi kontroversi seputar pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi yang masih menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *superbody*[[14]](#footnote-14).

Penting untuk menyoroti dan merinci kondisi dual chamber dalam pengaturan perundang-undangan, mengingat dampak signifikan yang dapat memengaruhi kepastian hukum di Indonesia. Dual chamber merujuk pada adanya dua kamar legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang terlibat dalam pembentukan undang-undang. Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks sistem hukum yang sedang berkembang.

Masalah mendasar yang perlu ditanggulangi adalah ketidakpastian hukum yang mungkin diakibatkan oleh konflik atau ketidakselarasan antara undang-undang yang dihasilkan oleh kedua kamar tersebut. Ketidakpastian ini dapat merugikan masyarakat sebagai obyek hukum, karena mereka mungkin kesulitan untuk memahami dan mengikuti peraturan yang berlaku. Posisi yang ambigu dalam pengaturan perundang-undangan ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kebingungan dan ketidakjelasan hukum di kalangan masyarakat.

Ketidakpastian hukum yang dihasilkan oleh *dual chamber* juga berpotensi merugikan fungsi hukum sebagai alat pengatur keseimbangan dalam masyarakat. Fungsi ini seharusnya bertujuan untuk meminimalisir konflik dan masalah di masa depan. Namun, jika peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh DPR dan DPD tidak sejalan atau saling bertentangan, hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan hukum yang berdampak pada ketidakpastian sosial.

Untuk mengatasi kondisi ini, kolaborasi antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga peradilan lainnya dianggap sebagai langkah yang sangat penting. Melalui dialog dan koordinasi yang intensif, fokus utama dari kerjasama ini adalah mencapai interpretasi hukum yang lebih baik dan sejalan dengan konstitusi. Kolaborasi semacam ini menjadi krusial dalam memastikan konsistensi dan kelangsungan sistem peradilan secara keseluruhan.

Dengan menghindari potensi konflik dan memastikan bahwa interpretasi hukum selaras, kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga peradilan lainnya bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan keadilan yang efektif. Selain itu, tujuannya juga melibatkan memastikan bahwa sistem peradilan dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat dengan baik. Upaya bersama ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil, dapat diandalkan, dan responsif terhadap dinamika perubahan dalam masyarakat.

**Kesimpulan**

 Secara keseluruhan, sistem peradilan di Indonesia memiliki struktur yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga dengan peran dan fungsi yang berbeda. Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki peran dalam pengadilan kasasi dan pengawasan terhadap sistem peradilan secara menyeluruh. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengadilan konstitusi dengan tugas menguji keberlakuan undang-undang terhadap norma-norma konstitusi dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, namun terdapat potensi konflik antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, terutama dalam konteks *dual chamber* pengaturan perundang-undangan yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Adanya dua jalur berbeda untuk menyelesaikan sengketa hukum dapat menyebabkan daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tanpa berkonsultasi dengan peradilan tinggi, meragukan integritas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Potensi konflik ini diperparah oleh sistem pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, memungkinkan pengaruh politik yang signifikan. Kekhawatiran akan independensi Mahkamah Konstitusi dan potensi campur tangan politik serta korupsi dapat merugikan kepercayaan publik pada lembaga tersebut. Meskipun demikian, ada peluang kolaborasi antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga peradilan lainnya. Revisi Undang - Undang Mahkamah Konstitusi untuk menyelaraskan posisi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga peradilan lainnya dapat menjadi langkah awal. Kolaborasi ini, melalui dialog dan koordinasi, diharapkan dapat mencapai interpretasi hukum yang lebih baik dan sejalan dengan konstitusi, meminimalisir potensi konflik, dan memastikan pelaksanaan keadilan yang efektif.

Evaluasi menyeluruh terhadap sistem peradilan, pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi, dan kerangka kerja hukum dapat menjadi langkah-langkah krusial dalam mengatasi potensi konflik dan meningkatkan integritas serta efektivitas lembaga peradilan di Indonesia. Kolaborasi antarlembaga menjadi kunci untuk memastikan konsistensi, kepastian hukum, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

**Daftar Pustaka**

Asep Nursobah. “Pengadilan Khusus,” 2021.

Castillo-Ortiz, Pablo. “The Illiberal Abuse of Constitutional Courts in Europe.” *European Constitutional Law Review* 15, no. 1 (2019): 48–72.

Chilton, Adam, and Mila Versteeg. *How Constitutional Rights Matter*. Oxford University Press, 2020.

Damayanti, Imelda Rosaria Rita, and Winarno Budyatmojo. “PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UPAYA PENEGAKAN KONSTITUSI DAN BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI.” *Souvereignty* 1, no. 3 (2022): 476–84.

Engkolan, Cenlia Brigita. “Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 8 (2022).

Gabriel Dorinda, S, Yovani Yolanda Putri Ginting, Tesalonika Amazia Simamora, Dwi Desi Yayi Tarina, and M H SH. “PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM REFORMASI SISTEM NEGARA INDONESIA,” n.d.

Lamataro, Cyrilius Wilton Taran, Chatryen M Dju Bire, and Jenny Ermalinda. “Mahkamah Konstitusi Dalam Mozaik Kerapuhan.” *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)* 1, no. 02 (2022): 65–70.

Mawaddah, Nuri Vina, and Kharisma Wulan Fadhila. “URGENSI PEMBENTUKAN PERADILAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA MENCIPTAKAN DEMOKRASI SUBSTANSIF.” *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 02 (2023): 195–212.

Nasirin, Ferina Dian Rizky Putri, Aulia Vani Rahmawati, Muhammad Defa Hakim, and Devi Yolanda. “Menguji Rasionalitas Dpr Dalam Pemecatan Hakim Konstitusi Di Tengah Masa Jabatan.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 6609–22.

Patra, Rommy. “Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 381–93.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta, 1970.

———. *UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970*. Jakarta, 1999.

Putro, Haryokusumo Nugroho, and Ferry Edwar. “A PERBANDINGAN HUKUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI BELGIA.” *Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 3 (2023): 661–72.

Rohman, M Najibur. “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia.” *Jurnal Supremasi*, 2021, 1–10.

Simanjuntak, Enrico. “Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83–104.

Soehalim, Jose Andre. “Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional Di Indonesia.” *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020).

Solihah, Ratnia. “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik.” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73–88.

Sulistyono, Adi, and Isharyanto. *Sistem Peradian Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Triyudiana, Andra, Ahmad Solehudin, Azhary Fathama, and Nabilla Putri Aryani. “Netralitas Profesi Hakim Di Tengah Intervensi Politik.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 01 (2022).

Vicenzo, Rivaldo, and Tundjung H Sitabuana. “Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan.” *PROSIDING SERINA* 2, no. 1 (2022): 139–46.

Yasa, I Wayan Budha. “Yudisialisasi Politik: Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Masalah Konstitusionalitas Undang-Undang Pemilihan Umum” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 825–43.

Yusa, I Gede, Bagus Hermanto, and Nyoman Mas Aryani. “No-Spouse Employment and the Problem of the Constitutional Court of Indonesia.” *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 11, no. 1 (47) (2020): 214–26.

1. Vicenzo & Sitabuana (2022) [↑](#footnote-ref-1)
2. Yasa (2022) [↑](#footnote-ref-2)
3. Patra (2022) [↑](#footnote-ref-3)
4. S Gabriel Dorinda et al., “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Reformasi Sistem Negara Indonesia,” n.d. [↑](#footnote-ref-4)
5. Solihah (2018) [↑](#footnote-ref-5)
6. Pemerintah Indonesia (1970) [↑](#footnote-ref-6)
7. Pemerintah Indonesia (1999) [↑](#footnote-ref-7)
8. Cyrilius Wilton Taran Lamataro, Chatryen M Dju Bire, and Jenny Ermalinda, “Mahkamah Konstitusi Dalam Mozaik Kerapuhan,” *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)* 1, no. 02 (2022): 65–70; Imelda Rosaria Rita Damayanti and Winarno Budyatmojo, “PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UPAYA PENEGAKAN KONSTITUSI DAN BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI,” *Souvereignty* 1, no. 3 (2022): 476–84. [↑](#footnote-ref-8)
9. Asep Nursobah (2021) dan Sulistyono & Isharyanto (2018) [↑](#footnote-ref-9)
10. Nuri Vina Mawaddah and Kharisma Wulan Fadhila, “*Urgensi Pembentukan Peradilan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Dalam Rangka Menciptakan Demokrasi Substansif*,” Jurnal Studia Legalia 4, no. 02 (2023): 195–212; Haryokusumo Nugroho Putro and Ferry Edwar, “*Perbandingan Hukum Tentang Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Belgia,*” Reformasi Hukum Trisakti 5, no. 3 (2023): 661–72; Jose Andre Soehalim, “Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional Di Indonesia,” *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020). [↑](#footnote-ref-10)
11. Enrico Simanjuntak, “Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83–104. [↑](#footnote-ref-11)
12. Cenlia Brigita Engkolan, “*Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi*,” COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 2, no. 8 (2022); Ferina Dian Rizky Putri Nasirin et al., “*Menguji Rasionalitas Dpr Dalam Pemecatan Hakim Konstitusi Di Tengah Masa Jabatan*,” Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 2 (2023): 6609–22; Andra Triyudiana et al., “*Netralitas Profesi Hakim Di Tengah Intervensi Politik*,” Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 1, no. 01 (2022). [↑](#footnote-ref-12)
13. Adam Chilton and Mila Versteeg, *How Constitutional Rights Matter* (Oxford University Press, 2020); Pablo Castillo-Ortiz, “The Illiberal Abuse of Constitutional Courts in Europe,” *European Constitutional Law Review* 15, no. 1 (2019): 48–72; I Gede Yusa, Bagus Hermanto, and Nyoman Mas Aryani, “No-Spouse Employment and the Problem of the Constitutional Court of Indonesia,” *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 11, no. 1 (47) (2020): 214–26. [↑](#footnote-ref-13)
14. Soehalim, “*Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional Di Indonesia*”; Lamataro, Bire, and Ermalinda, “Mahkamah Konstitusi Dalam Mozaik Kerapuhan.” [↑](#footnote-ref-14)